

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu-isu mengenai pengungsi merupakan salah satu persoalan yang seringkali didiskusikan di berbagai negara di dunia. Per pertengahan 2021, ada 84 juta orang yang menjadi *forcibly displaced person*: 48 juta di antaranya adalah *internally displaced person*; 4,4 juta di antaranya merupakan pencari suaka; dan 26,6 juta di antaranya adalah para pengungsi (UNHCR, 2021). Sejauh 68 persen dari para pengungsi tersebut berasal dari Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan, dan Myanmar. Sekitar 85 persen pengungsi ditampung oleh negara berkembang dan 73 persen ditampung oleh negara tetangga (UNHCR, 2021).

Afghanistan merupakan salah satu negara yang menyumbang jumlah pengungsi terbesar di dunia. Hal ini disebabkan oleh konflik-konflik, baik yang melibatkan pihak eksternal maupun internal, mulai dari invasi Uni Soviet, masuknya Amerika Serikat, hingga perebutan kekuasaan antarkelompok di Afghanistan. Pada umumnya, para pengungsi Afghanistan melarikan diri ke negara tetangga, seperti Pakistan dan Iran. Iran sendiri merupakan salah satu negara yang menampung pengungsi terbanyak di dunia. Di tahun 2021, ada sekitar 800.000 pengungsi di Iran: sejumlah 780.000 di antaranya adalah pengungsi Afghanistan dan 20.000 di antaranya adalah pengungsi Irak (UNHCR, 2021). Selain angka tersebut, terdapat kira-kira dua juta orang Afghanistan yang tidak terdata (UNHCR, 2021).

Pada pertengahan 2021, terjadi gelombang pengungsi Afghanistan yang melarikan diri ke negara tetangga, salah satunya adalah Iran. Hal ini disebabkan oleh kembalinya Taliban untuk mengambil alih tampuk kekuasaan di Afghanistan. Pengambilalihan Taliban ini didahului pengumuman rencana penarikan pasukan AS dari Afghanistan oleh Presiden Joe Biden pada April 2021. Setelah pengumuman ini, para milisi Taliban mencoba merebut kembali kontrol atas seluruh wilayah Afghanistan yang menyebabkan krisis dalam negeri. Akibatnya adalah penambahan pengungsi yang melarikan diri dari Afghanistan menuju Iran. Iran menjadi negara tujuan karena posisinya yang bersebelahan dengan Afghanistan.



Gambar 1.1 Peta Afghanistan dan Iran

Sumber: The Iran Primer, 2021 (iranprimer.usip.org)

Perbatasan resmi Afghanistan-Iran memang ditutup, tetapi masih ada warga Afghanistan yang menyeberang ke Iran. Menanggapi hal ini, beberapa pejabat Iran, seperti Menteri Interior Iran Ahmad Vahid dan Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi meminta pemerintah Afghanistan untuk meningkatkan kondisi

dalam negeri agar warganya tidak menyeberangi perbatasan (Aljazeera, 2021). Mereka juga menyangkal laporan dari International Organization for Migration (IOM) mengenai deportasi paksa dan perlakuan tak adil terhadap pengungsi Afghanistan di Iran. Mereka berkata Iran menjamin pengungsi Afghanistan yang datang, tetapi mereka juga mengeluhkan bahwa selama ini bantuan dari komunitas internasional kepada Iran untuk mengurus pengungsi Afghanistan masih kurang (Aljazeera, 2021). UNHCR juga meminta pemerintah Iran untuk tetap membuka perbatasannya dengan Afghanistan.

Menyusul penambahan pengungsi ini, banyak pihak yang menyerukan pihak internasional untuk membantu penanganan pengungsi Afghanistan, terutama di Iran. Salah satu pihak yang didesak untuk berbuat lebih adalah Uni Eropa. Iran dan Uni Eropa telah menjadi mitra penanganan pengungsi Afghanistan di Iran. Isu pengungsi ini juga salah satu persamaan kepentingan kedua pihak, terutama Uni Eropa. Pengungsi Afghanistan acap kali menjadikan negara-negara Eropa menjadi tempat mencari kehidupan yang lebih baik. Hal inilah yang membuat Uni Eropa khawatir. Sejak tahun 1997, Uni Eropa sudah memberi bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Afghanistan di Iran (Osiewicz, 2018).

Pada bulan Agustus 2021, Uni Eropa mengumumkan akan meningkatkan alokasi dana kemanusiaan untuk pengungsi Afghanistan di Afghanistan dan negara sekitarnya, termasuk Iran. Kebijakan ini menyusul pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Pada tahun 2022, Uni Eropa kembali meningkatkan dana bantuan kemanusiaan ini.



Gambar 1.2 Peta Uni Eropa dan Iran

Sumber: Worthy Christian News, 2021 (worthynews.com)

Kemitraan Uni Eropa dan Iran dalam penanganan pengungsi Afghanistan cukup krusial karena Iran merupakan tetangga Afghanistan sekaligus tempat singgah para pengungsi Afghanistan yang hendak menuju negara-negara Uni Eropa (lihat Gambar 1.2). Setelah menetap di Iran, para pengungsi Afghanistan yang menuju Eropa biasanya akan melanjutkan perjalanan ke Turki, lalu menuju Eropa via laut atau darat.

Mengenai kerja sama Uni Eropa dan Iran terkait pengungsi Afghanistan di Iran, termasuk pemberian dana bantuan kemanusiaan Uni Eropa untuk pengungsi Afghanistan di Iran, sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas atau menyinggung hal tersebut, seperti “EU-Iran Relations in the Post-JCPOA Period: Selected Political Aspects” oleh Osiewicz (2018), dan “EU-Iran Relations After

Brexit” oleh Mousavian (2016). Lalu, ada studi lain, yaitu “Between a Rock and a Hard Place: Afghan Migration to Europe from Iran” oleh Crawley dan Kaytaz (2022) yang menceritakan pengalaman pengungsi Afghanistan yang memilih melanjutkan perjalanan ke negara-negara Uni Eropa di Iran yang disebabkan kesulitan yang mereka hadapi di Iran. Selain itu, ada studi yang membahas perkembangan kebijakan Iran terhadap pengungsi Afghanistan, yaitu “Afghans in Iran: the state and the working of immigration policies” oleh Siavoshi (2022).

Pada keempat studi tersebut, belum ada yang membahas secara spesifik kebijakan Uni Eropa meningkatkan dana bantuan kemanusiaannya untuk pengungsi Afghanistan di Afghanistan dan negara-negara sekitarnya, termasuk Iran. Kebijakan ini merupakan respons Uni Eropa terhadap krisis politik di Afghanistan yang terjadi pada Agustus 2021 lalu.

Menggunakan pendekatan realisme neoklasik dan konsep politik bantuan luar negeri, ditemukan bahwa penambahan alokasi dana bantuan kemanusiaan oleh Uni Eropa untuk pengungsi Afghanistan di Iran merupakan respons dari rencana penarikan pasukan AS dari Afghanistan yang disusul kembali berkuasanya Taliban yang menyebabkan peningkatan kembali jumlah pengungsi Afghanistan.

Pemberian dana bantuan kemanusiaan oleh Uni Eropa berperan sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negerinya dengan Iran, khususnya terkait pengungsi yang seringkali digunakan sebagai alat tawar dalam interaksi Uni Eropa-Iran. Kebijakan ini ditempuh guna mengurangi penambahan jumlah pengungsi ke Uni Eropa. Penambahan alokasi dana ini diharapkan akan membantu Iran

membantu penanganan pengungsi sembari meningkatkan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan para pengungsi. Hal ini diharapkan akan memperbesar kemungkinan para pengungsi untuk tetap di Iran sehingga mereka tidak pergi ke negara-negara Uni Eropa.

Menganalisis penyebab peningkatan dana bantuan Uni Eropa untuk pengungsi Afghanistan merupakan hal yang penting untuk mengetahui bagaimana Uni Eropa merespons krisis di Afghanistan. Langkah yang ditempuh Uni Eropa ini juga menjadi krusial mengingat kebijakan ini merupakan upaya mengurangi penambahan jumlah pengungsi yang masuk ke Uni Eropa melalui Iran akibat krisis di Afghanistan.

Analisis penyebab meningkatnya dana bantuan kemanusiaan Uni Eropa untuk pengungsi Afghanistan di Iran dengan pendekatan realisme neoklasik dan konsep politik bantuan luar negeri adalah kebaruan yang ditawarkan peneliti dalam penelitian terkait isu pengungsi Afghanistan di Iran. Penelitian-penelitian yang sudah ada belum ada yang membahas secara rinci peningkatan dana bantuan kemanusiaan pengungsi Afghanistan di Iran mengingat kebijakan ini baru dilaksanakan oleh Uni Eropa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah mengapa Uni Eropa meningkatkan alokasi dana bantuan kemanusiaannya untuk pengungsi Afghanistan di Iran?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui mengapa Uni Eropa meningkatkan dana bantuan kemanusiaannya untuk pengungsi Afghanistan di Iran.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis kepentingan Uni Eropa dalam pemberian dana bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Afghanistan di Iran; dan
2. Menganalisis faktor penyebab peningkatan dana bantuan kemanusiaan Uni Eropa untuk pengungsi Afghanistan di Iran.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara akademis maupun praktis.

1.4.1 Secara Akademis

Penelitian ini bertujuan sebagai sumbangsih dalam studi Hubungan Internasional dengan menganalisis peningkatan pemberian dana bantuan kemanusiaan oleh Uni Eropa untuk pengungsi Afghanistan di Iran menggunakan pendekatan realisme neoklasik dan konsep politik bantuan luar negeri.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai penelitian empiris yang dapat menambah informasi kepada pembacanya terkait dengan peningkatan dana bantuan kemanusiaan Uni Eropa untuk pengungsi Afghanistan di Iran.

1.5 Studi Pustaka

Topik penelitian ini terinspirasi dari beberapa studi sebelumnya yang mendiskusikan atau menyinggung mengenai kerja sama Uni Eropa dan Iran terkait pengungsi. Studi pertama adalah “EU-Iran Relations in the Post-JCPOA Period: Selected Political Aspects” oleh Osiewicz (2018). Studi ini mendiskusikan hubungan antara Iran dan Uni Eropa pasca disepakatinya kesepakatan nuklir Iran pada berbagai aspek politik, seperti isu proliferasi nuklir, sikap terhadap perubahan politik di Timur Tengah, konflik regional, terutama di Yaman dan Suriah, usaha menumpas ISIS, bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Afghanistan yang tak terdokumentasi, dan isu-isu kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Iran. Studi menjelaskan bahwa Uni Eropa sudah melakukan pemberian bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Afghanistan di Iran sejak tahun 1997. Studi ini juga menyinggung bahwa semakin Uni Eropa mendanai bantuan ini, akan meningkatkan kemungkinan para pengungsi untuk tetap di Iran alih-alih bermigrasi ke Eropa.

Studi kedua yang menjadi referensi adalah “EU-Iran Relations After Brexit” oleh Mousavian (2016). Studi ini mendiskusikan dinamika dan paradigma baru Uni Eropa dalam menjalin hubungan dengan Iran setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Studi ini juga menyinggung permasalahan pengungsi dari Timur Tengah yang membanjiri Eropa menjadi ujian untuk kohesi sosial dan layanan publik benua tersebut. Maka dari itu, Uni Eropa perlu aktor penting di Timur Tengah yang memiliki pengaruh luas dalam rangka menjaga stabilitas Timur Tengah. Aktor itu adalah Iran yang memiliki pengaruh dan sistem politik yang cukup stabil. Lalu, peneliti menjelaskan bahwa Iran dapat menjadi mitra efektif dalam menghadapi

ancaman yang dihadapi Uni Eropa, seperti terorisme, migrasi, dan ekonomi yang tersendat.

Studi ketiga adalah “Between a Rock and a Hard Place: Afghan Migration to Europe from Iran” oleh Crawley dan Kaytaz (2022). Menggunakan pengalaman pengungsi Afghanistan yang pergi ke Eropa, studi ini menjelaskan alasan mengapa mereka memutuskan pergi ke Eropa setelah menetap di Iran. Para pengungsi bercerita bahwa di Iran, mereka mengalami diskriminasi, kesulitan dalam hal administrasi, dan kurangnya kesempatan supaya mereka dapat hidup lebih baik. Inilah yang membuat mereka pergi ke Eropa. Lalu, studi ini menggunakan konsep *protracted displacement* untuk menggambarkan kondisi mereka dan mengkritik langkah-langkah Uni Eropa dalam hal penanganan pengungsi Afghanistan yang tiba di Eropa.

Studi terakhir, yaitu “Afghans in Iran: the state and the working of immigration policies” oleh Siavoshi (2022). Studi ini membahas perkembangan kebijakan imigrasi Iran, dengan contoh pengungsi Afghanistan di Iran. Studi ini menjelaskan perkembangan kebijakan Iran mengenai imigran pengungsi Afghanistan sejak awal berdirinya Republik Islam Iran sampai sekarang. Selain itu, studi ini menjelaskan beberapa faktor yang menjadi landasan pengambilan kebijakan dan siapa saja aktor yang terlibat dalam penanganan imigran asal Afghanistan.

Keempat studi di atas sama-sama membahas atau setidaknya menyinggung mengenai pengungsi Afghanistan di Iran. Ketiga studi pertama sama-sama

menjelaskan bahwa dalam kerja sama penanganan pengungsi Afghanistan di Iran, Uni Eropa memiliki kepentingan untuk mencegah masuknya pengungsi ke Eropa. Lalu, kerja sama ini merupakan kepentingan yang sejalan dari Uni Eropa dan Iran dan telah berlangsung sejak tahun 1997. Kemudian, dua studi terakhir memperlihatkan bagaimana kebijakan Iran terhadap pengungsi Afghanistan dan efeknya terhadap kehidupan para pengungsi itu. Dari studi-studi yang sudah ada, belum ada yang menyinggung peningkatan alokasi dana kemanusiaan Uni Eropa untuk pengungsi Afghanistan di Iran. Hal ini dapat dipahami mengingat kebijakan ini baru dikeluarkan oleh Uni Eropa pada Agustus 2021. Penelitian ini hadir untuk menganalisis kebijakan baru ini.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan realisme neoklasik dan konsep politik bantuan luar negeri.

1.6.1 Realisme Neoklasik

Realisme neoklasik adalah salah satu pendekatan dalam kajian hubungan internasional yang merupakan turunan dari realisme klasik. Sama seperti pendahulunya, keamanan, anarki, dan kepentingan nasional menjadi komponen yang penting dalam pendekatan ini. Yang membedakan realisme neoklasik dan realisme klasik adalah realisme neoklasik mengintegrasikan ide realisme klasik, seperti kepemimpinan dan kebijakan luar negeri dengan ide neorealisme mengenai struktur anarki yang terdesentralisasi antara negara-negara yang dikemukakan Stephen Waltz (Jackson dan Sorensen, 2013). Pada realisme klasik, yang menjadi

pusat perhatian adalah pemimpin negara dan kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, pendekatan neorealis menjelaskan bahwa struktur dalam sistem internasional-lah yang menjadi fokusnya sehingga peran pemimpin menjadi kurang penting (Jackson dan Sorensen, 2013). Struktur internasional yang anarki ini menjadi penentu bagaimana negara merespons lingkungan eksternalnya dalam kebijakan luar negeri.

Pada realisme neoklasik, struktur internasional mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara yang dipimpin seorang pemimpin, tetapi kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi internal negara tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan “mengapa, bagaimana, dan dalam kondisi apa karakteristik internal dari negara memengaruhi antara persepsi dari pemimpin mengenai ancaman internasional dan kesempatan, serta kebijakan diplomatik, militer, dan ekonomi yang akan ditempuh oleh pemimpin tersebut.” (Mencutek et al, 2020).

Menurut Rose, ada empat asumsi teoretis dalam realisme neoklasik, yaitu anarki internasional, keamanan, karakteristik suatu negara, dan interaksi antara *relative power* suatu negara yang berkaitan dengan variabel domestik (Mencutek et al, 2020). Variabel domestik atau variabel *intevening* yang menjadi penghubung antara variabel independen (tekanan sistem) dan variabel dependen (kebijakan luar negeri). Pada kondisi anarki internasional, negara begitu sulit menemukan keamanan. Inilah yang membuat negara berusaha mencari keamanan, termasuk dengan strategi yang bertujuan mengontrol atau membentuk lingkungan eksternalnya (Mencutek et al, 2020). Usaha atau tujuan tersebut akan dibentuk ulang tergantung reaksi negara menerima usaha-usaha tersebut dari “sistem”. Pilihan-pilihan untuk mengeluarkan kebijakan bukanlah sesuatu yang sudah

ditetapkan sebelumnya, melainkan terdiri dari berbagai macam pilihan yang tersedia. Kebijakan luar negeri juga dibuat oleh para pemimpin politik sehingga persepsi mereka akan *relative power* penting, bukan hanya semata-mata *power* dalam bentuk material yang dimiliki negara (Mencutek et al, 2020).

Kondisi internal suatu negara penting dalam realisme neoklasik mengingat para pemimpin di dalamnya memegang peranan dalam menentukan kepentingan dan kebijakan yang akan diambil. Menurut Hu, kepentingan dan ancaman tidak secara otomatis muncul dari sistem internasional, tetapi terkonstruksi secara sosial lewat *ideas and values* (Gvalia et al, 2019). Ketika pemimpin memiliki ide dan ideologi yang sama, mereka akan lebih mudah mengambil kebijakan yang uniter. Persamaan ini juga akan mempermudah negara untuk memobilisasi sumber daya dari masyarakatnya dalam membuat kebijakan luar negeri.

1.6.2 Politik Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri (*foreign aid*) merupakan salah satu elemen kebijakan luar negeri bagi banyak negara. Pemberian bantuan luar negeri sudah berlangsung sejak Perang Dunia I; negara-negara kaya bertukar barang, jasa, dan dana sebagai cara untuk berinteraksi dengan negara lain (Milner dan Tingley, 2013). Beberapa tujuan kebijakan dalam pemberian bantuan antara lain: militer, bantuan kemanusiaan dan bencana, dan pembangunan ekonomi (Milner dan Tingley, 2013).

Hans Morgenthau di dalam tulisannya yang berjudul “A Political Theory of Foreign Aid” pada tahun 1962 membahas konsep politik bantuan luar negeri. Morgenthau sendiri merupakan pakar politik internasional yang beraliran realis sehingga paparannya mengenai politik bantuan luar negeri kental dengan nuansa

realisme, khususnya kepentingan negara pemberi bantuan tersebut. Dalam pandangan realisme, bantuan luar negeri adalah sebuah alat kenegaraan, seperti halnya diplomasi, propaganda, dan aksi militer yang dipengaruhi oleh pola kekuatan struktural di dunia (Malacalza, 2019).

Pemberian bantuan dapat meningkatkan diplomasi dengan negara penerima, meningkatkan stabilitas untuk negara yang memiliki kepentingan strategis, meningkatkan pasar ekspor, mengamankan impor strategis, dan meningkatkan reputasi di forum internasional, serta kepentingan ekonomi dan politik lainnya (Malacalza, 2019). Bantuan juga dapat menjadi justifikasi, baik moral maupun retorik, bagi sang pendonor untuk melakukan alokasi sumber daya (Malacalza, 2019).

Beberapa jenis bantuan luar negeri menurut Morgenthau (1962):

1. Bantuan kemanusiaan;
2. *Subsistence foreign aid*;
3. Bantuan luar negeri militer;
4. *Bribery*;
5. *Prestige foreign aid*;
6. Bantuan luar negeri untuk pengembangan ekonomi;

Pada penelitian ini, peneliti menekankan bantuan luar negeri berupa bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan pada dasarnya bersifat nonpolitik karena bertujuan menyelamatkan manusia dan mengakhiri krisis, serta meredakan penderitaan manusia akibat krisis yang lahir dari situasi perang, konflik, atau

bencana alam. Walaupun demikian, bantuan ini, dalam konteks politik tertentu, dapat memiliki suatu fungsi politik (Morgenthau, 1962).

Senada dengan Morgenthau, Dany (2015) berpendapat bahwa bantuan kemanusiaan pada dasarnya bersifat politis dan merupakan “proyek politik di dunia yang politis”, serta selalu terkait dengan kondisi politik di tempat diberikannya bantuan itu. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, bantuan kemanusiaan diberikan untuk meredakan penderitaan di negara-negara ketiga, seperti Sudan, Angola, dan Etiopia (Dany, 2015). Namun, pada era 1990-an, mulai berkembang gagasan untuk menghubungkan antara bantuan kemanusiaan dan politik bersamaan dengan banyaknya misi perdamaian oleh PBB. Pada awal abad ke-21, bantuan kemanusiaan digunakan untuk melawan terorisme dengan tujuan mengurangi penderitaan sekaligus untuk melindungi keamanan negara dengan cara mengurangi migrasi dan melakukan demokratisasi pada suatu area (Dany, 2015).

Persoalannya bukanlah apakah bantuan kemanusiaan itu politis, melainkan bagaimana bisa menjadi politis. Politisasi bantuan kemanusiaan bukanlah suatu yang tiba-tiba menjadi politis. Dany (2015) mengemukakan politisasi bantuan kemanusiaan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Instrumentalisasi

Bantuan kemanusiaan digunakan dalam rangka kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan. Salah satu contohnya adalah memberikan bantuan kepada area yang memiliki kepentingan strategis.

2. Militerisasi

Tindakan militer dan kemanusiaan menjadi samar-samar, terutama saat bantuan menjadi upaya strategi *counter-insurgency*. Penerapannya adalah ketika militer melindungi pengiriman bantuan kemanusiaan dari serangan.

3. *Developmentalization*

Bantuan kemanusiaan mengemban tugas politik yang lebih banyak, seperti mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dan mempromosikan demokrasi. Hal ini mengalihkan tujuan utama bantuan kemanusiaan, yaitu untuk meredakan penderitaan manusia.

1.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoretis di atas, peningkatan alokasi dana bantuan kemanusiaan Uni Eropa untuk pengungsi Afghanistan di Iran dilatarbelakangi oleh kepentingan Uni Eropa untuk mencegah penambahan pengungsi. Iran merupakan salah satu negara yang menampung populasi pengungsi Afghanistan terbesar di dunia sekaligus rute penting bagi pengungsi Afghanistan yang hendak menuju Eropa. Untuk itu, Uni Eropa akan berusaha mencegah naiknya jumlah imigran dari luar Eropa, termasuk Afghanistan. Meningkatnya imigran, terutama pengungsi, dalam beberapa tahun belakangan ini, merupakan masalah domestik yang dihadapi Uni Eropa. Kebijakan ini merupakan respons Uni Eropa atas krisis di Afghanistan setelah rencana penarikan pasukan AS yang disusul kembali berkuasanya Taliban yang disertai dengan larinya warga Afghanistan dari negaranya.

1.8 Definisi Konsep

1.8.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri mekanisme yang digunakan suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Kebijakan luar negeri pada penelitian ini adalah cara atau mekanisme yang digunakan Uni Eropa untuk membentuk kebijakan luar negerinya dan hubungannya dengan negara non-Uni Eropa.

1.8.2 Pengungsi

Pengungsi, menurut Konvensi 1951, adalah orang yang akibat ada rasa takut akan persekusi karena alasan-alasan, seperti ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok atau opini politik tertentu, berada di luar negaranya atau tidak bisa atau tidak ingin menggunakan perlindungan negaranya karena adanya ketakutan-ketakutan tersebut.

1.8.3 Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan adalah bantuan yang biasa bersifat nonpolitis dalam bentuk seperti bantuan bencana alam, medis, pertanian, atau bantuan-bantuan yang biasa diberikan oleh lembaga kemanusiaan. Namun, dalam situasi tertentu, bantuan kemanusiaan bisa memiliki unsur politik.

1.9 Definisi Operasional

1.9.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri pada penelitian ini adalah pemberian bantuan kemanusiaan oleh Uni Eropa untuk pengungsi Afghanistan di Iran. Pemberian

bantuan kemanusiaan ini merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri Uni Eropa dengan negara non-Uni Eropa, yaitu Iran.

1.9.2 Pengungsi

Pada penelitian ini, pengungsi yang dimaksud adalah pengungsi Afghanistan yang melarikan diri dari negaranya menuju Iran. Mereka juga seringkali menjadikan Iran sebagai salah satu rute untuk perjalanan mereka bermigrasi ke Eropa.

1.9.3 Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan pada penelitian ini adalah dana bantuan kemanusiaan Uni Eropa untuk pengungsi Afghanistan di Iran. Pemberian bantuan kemanusiaan oleh Uni Eropa untuk pengungsi Afghanistan di Iran pada penelitian ini merupakan salah satu bentuk kebijakan luar negeri Uni Eropa.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *process tracing*. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Ansori dan Herdiman, 2019). Lalu, metode *process tracing* digunakan untuk melacak sebab akibat dari suatu fenomena. Di sini, cerita disusun berdasarkan urutan logis antara variabel independen, *intervening*, dan dependen (Rosyidin, 2019). Sebab, tanpa adanya variabel *intervening*, variabel independen tak akan menghasilkan variabel dependen.

1.10.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah *systematic literature review* (SLR) yang merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan, serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu (Triandini, 2019). Teknik ini dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menginterpretasi penelitian-penelitian yang tersedia. Sumber data pada penelitian adalah sumber sekunder yang tidak langsung didapat dari narasumber, yaitu berupa literatur-literatur seperti *website* resmi, laporan, artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber berita.